

LAMPIRAN

PERATURAN

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 01/Per/M.KUKM/I/2006

**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI**

Lampiran 1

**Notulen Rapat
Pendirian Koperasi**

Hari ini :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Pimpinan Rapat :
Isi rapat :

Telah diadakan Rapat Anggota Pendirian Koperasi yang dihadiri oleh orang peserta, dengan pimpinan rapat yang dipilih oleh peserta rapat.

- Pimpinan rapat menyampaikan agenda acara Rapat sebagai berikut :
 1. (misalnya : membahas Anggaran Dasar Koperasi).
 2.
 3.
 4. dan seterusnya.

- Peserta rapat masing-masing menyampaikan dan seterusnya.
- Pimpinan rapat menyampaikan kesimpulan rapat.
- Peserta rapat menyampaikan :
 1. Menyetujui (misalnya : membahas Anggaran Dasar Koperasi).
 2. Menyetujui
 3. Dan seterusnya.
- Pimpinan rapat menyampaikan kesimpulan akhir rapat dan seterusnya.

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara, maka pimpinan rapat menutup rapat pada jamWIB.

Dari segala sesuatu yang tersebut terdahulu, ,aka dibuatlah Notulen Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Peserta Rapat

(.....)

....., 200....

Pimpinan Rapat

(.....)

Lampiran 2

KOPERASI

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan pengesahan
Akta Pendirian Koperasi.

Kepada Yth.

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau
Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Propinsi/D.I.
atau Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Kabupaten/Kota

..... *)
Di

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar koperasi dicatat dan
mendapatkan pengesahan akta pendirian/badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, bersama ini kami lampirkan :

1. Dua rangkap akta pendirian koperasi Satu di antaranya bermaterai cukup,
2. Data Akta Pendirian Koperasi,
3. Notulen Rapat Pembentukan Koperasi,
4. Surat Kuasa,
5. Surat bukti tersedianya modal,
6. Rencana kegiatan usaha koperasi,
7. Susunan Pengurus dan Pengawas,
8. Daftar hadir rapat pembentukan,
9. Fotocopy KTP dari para pendiri.

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Kuasa Pendiri

(.....)

(.....)

AKTA PENDIRIAN
KOPERASI
Nomor

Pada hari ini, Tanggal (.....) Pukul Waktu Indonesia Bagian

Berhadapan dengan saya Sarjana Hukum, Notaris yang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor tanggal ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota dan berkantor di dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini.

1. Tuan dst.
2. Tuan dst.

Yang selanjutnya dst

Menurut keterangan penghadap, penghadap bertindak :

- a. Untuk diri sendiri.
- b. Berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal (.....) bermaterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada asli akta ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :
 1. Tuan dst.
 2. Tuan dst.

Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa pada hari tanggal jam sampai dengan jam bertempat di jalan telah diadakan rapat pendirian koperasi berkedudukan dan berkantor Sedangkan susunan pengurus dan pengawas dimuat dalam Notulen Rapat tertanggal bermaterai cukup dilekatkan pada minuta ini.
- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir orang, yang merupakan pendiri koperasi,
- Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut menyatakan bahwa rapat anggota pendirian koperasi telah memutuskan antara lain sebagai berikut.
- Menyetujui susunan pengurus koperasi.
 - a. Menyetujui isi anggaran dasar yang berbunyi sebagai berikut :

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1)
- (2) Koperasi Ini termasuk dalam jenis koperasi

BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP
Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

BAB III
TUJUAN DAN USAHA
Pasal

1.
2.
3. Kegiatan Unit Simpan Pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota Koperasi, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya.
4. Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan terpisah dari unit usaha lainnya.
5. Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan oleh tenaga pengelola yang mempunyai keahlian di bidang keuangan, atau pernah mengikuti pendidikan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

BAB V
RAPAT ANGGOTA

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

BAB VI
PENGURUS

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

BAB VII
PENGAWAS

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

BAB VIII
PENGELOLAAN USAHA

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

BAB IX
PENASEHAT
Pasal

.....

.....

BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI
Pasal

.....

.....

BAB XI
MODAL KOPERASI
Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

BAB XII
SISA HASIL USAHA
Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

BAB XIII
PEMBUBARAN
Pasal

- a. Keputusan Rapat Anggota, atau
- b. Keputusan Pemerintah apabila :
 - Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal

.....

.....

BAB XIV
SANKSI
Pasal

.....

.....

BAB XV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI
Pasal

.....

.....

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS
Pasal

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang membuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal

Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota Pembentukan koperasi yang dilaksanakan di pada hari tanggal bulan tahun

BAB XVII
PENUTUP
Pasal

Terhitung mulai tanggal untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

Pengawas :

1. Nama :

Tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

KTP No. :

2. Nama :

Tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

KTP No. :

3. dst.

Pengurus :

Ketua : Nama :

Tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

KTP No. :

Sekretaris : Nama :
Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP No. :

Bendahara : Nama :
Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP No. :

Pasal

Pengangkatan anggota Pengurus disahkan dalam rapat anggota yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal

Tuan/Nyonya bertempat tinggal di diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian ini, di kantor yang berwenang dan menandatangani permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan yang berkaitan dengan permohonan pengesahan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh keduanya dan bertempat tinggal di dan di sebagai saksi-saksi.
- Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Pembuat Akta Koperasi kepada para penghadap dan saksi-saksi. Maka ditandatangani akta ini oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Minuta akta ini ditandatangani secukupnya.
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Pembuat Akta Koperasi

(.....)

**AKTA PENDIRIAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM**
Nomor

Pada hari ini, tanggal (.....) Pukul Waktu Indonesia Bagian

Berhadapan dengan saya Sarjana Hukum, Notaris yang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor tanggal ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota dan berkantor di dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini.

1. Tuan dst.
2. Tuan dst

Yang selanjutnya dst
Menurut keterangan penghadap, penghadap bertindak :

- Untuk diri sendiri.
- Berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal (.....) bermaterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada asli akta ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :
 1. Tuan dst
 2. Tuan dst

Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa pada hari tanggal jam sampai dengan jam bertempat di jalan Telah diadakan rapat pendirian koperasi berkedudukan dan berkantor di Sedangkan susunan pengurus dan pengawas dimuat dalam Notulen Rapat tertanggal bermaterai cukup dilekatkan pada minuta ini.
- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir orang, yang merupakan pendiri koperasi.
- Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut menyatakan bahwa rapat anggota pendirian koperasi telah memutuskan antara lain sebagai berikut.
- Menyetujui susunan pengurus koperasi.
- Menyetujui isi anggaran dasar yang berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama dst.
- (2) Koperasi ini termasuk dalam jenis koperasi
- (3) Koperasi dapat dst.

**BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP**

Pasal

.....
.....

BAB III
TUJUAN DAN USAHA

Pasal

1.
2.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

BAB V
RAPAT ANGGOTA

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

.....

BAB VI
PENGURUS

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

BAB VII
PENGAWAS

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

BAB VIII
PENGELOLAAN USAHA

Pasal 1

Mempunyai pengetahuan, keahlian dan wawasan di bidang simpan pinjam

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

BAB IX
PENASEHAT

Pasal

.....

.....

Pasal

.....
.....

BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal

.....
.....

BAB XI
MODAL KOPERASI

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

BAB XII
SISA HASIL USAHA

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

BAB XIII
PEMBUBARAN
Pasal

- a. Keputusan Rapat Anggota, atau
- b. Keputusan Pemerintah apabila :
 - 1. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - 2. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
 - 3. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal

.....
.....

BAB XIV
SANKSI
Pasal

.....
.....

BAB XV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI
Pasal

.....
.....

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS
Pasal

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang membuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal

Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota Pembentukan koperasi yang dilaksanakan di pada hari tanggal bulan tahun

BAB XVII
PENUTUP
Pasal

Terhitung mulai tanggal untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

Pengawas :

1. Nama :
Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP No. :
2. Nama :
Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP No. :
3. dst.

Pengurus :

- Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :

Pasal

Pengangkatan anggota Pengurus disahkan dalam rapat anggota yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal

Tuan/Nyonya bertempat tinggal di diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian ini, di kantor yang berwenang dan menandatangani permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan yang berkaitan dengan permohonan pengesahan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh keduanya dan bertempat tinggal di dan di sebagai saksi-saksi.

- Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Pembuat Akta Koperasi kepada para penghadap dan saksi-saksi. Maka ditandatangani akta ini oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Minuta akta ini ditandatangani secukupnya.
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Pembuat Akta Koperasi

(.....)

**AKTA PENDIRIAN
KOPERASI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- Tanggal lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- KTP No. :
- 2. Nama :
- Tanggal lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- KTP No. :
- 3. Nama :
- Tanggal lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- KTP No. :
- 4. Nama :
- Tanggal lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- KTP No. :

Atas kuasa rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi dan menyatakan mendirikan koperasi serta menandatangani anggaran dasar koperasi yang isinya sebagai berikut :

**BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1)
- (2) Koperasi ini termasuk dalam jenis koperasi
- (3)

**BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB III
TUJUAN DAN USAHA**

Pasal

- 1.
- 2.

3. Kegiatan unit Usaha Simpan Pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota Koperasi, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya.
4. Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya.
5. Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan oleh tenaga pengelola yang mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pendidikan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

BAB V
RAPAT ANGGOTA

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

BAB VI
PENGURUS

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

BAB VII
PENGAWAS

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

BAB VIII
PENGELOLAAN USAHA

Pasal

.....

Pasal

.....

BAB IX
PENASEHAT

Pasal

.....

Pasal

.....

BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal

.....

.....

BAB XI
MODAL KOPERASI

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

BAB XII
SISA HASIL USAHA

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal

- a. Keputusan Rapat Anggota, atau
- b. Keputusan Pemerintah apabila :
 - Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
 - Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

BAB XIV
SANKSI

Pasal

.....

.....

BAB XV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal

.....

.....

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS
Pasal

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang membuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XVII
PENUTUP
Pasal

Demikian anggaran dasar koperasi ini ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh oleh rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan di pada tanggal

	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.
3.

**AKTA PENDIRIAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP No. :
2. Nama :
Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP No. :
3. Nama :
Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP No. :
4. dst.

Atas kuasa rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi dan menyatakan mendirikan koperasi serta menandatangani anggaran dasar koperasi yang isinya sebagai berikut :

**BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama dst.
- (2) Koperasi ini termasuk dalam jenis koperasi
- (3) Koperasi dapat

**BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP**

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

**BAB III
TUJUAN DAN USAHA**

Pasal

1.
2.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

BAB V
RAPAT ANGGOTA

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

Pasal

.....

BAB VI
PENGURUS

Pasal

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

**BAB VII
PENGAWAS**

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

**BAB VIII
PENGELOLAAN USAHA**

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

**BAB IX
PENASEHAT**

Pasal

.....

.....

**BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI**

Pasal

.....

.....

BAB XI
MODAL KOPERASI
Pasal

.....
.....
Pasal

BAB XII
SISA HASIL USAHA
Pasal

.....
.....
Pasal

.....
.....
Pasal

BAB XIII
PEMBUBARAN
Pasal

- a. Keputusan Rapat Anggota, atau
b. Keputusan Pemerintah apabila :
- Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
 - Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal

.....
.....
Pasal

BAB XIV
SANKSI
Pasal

BAB XV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI
Pasal

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS
Pasal

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang membuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XVII
PENUTUP
Pasal

Demikian anggaran dasar koperasi ini ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh oleh rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan di pada tanggal

	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.
3.

DATA AKTA PENDIRIAN KOPERASI
(Pasal 7 AYAT (1) DAN Pasal 8 UU No.25/92)

1. Nama Koperasi :
2. Tempat Kedudukan :
3. NPWP Koperasi
 - a. Nomor :
 - b. Kantor Pelayanan Pajak yang mengeluarkan :
4. Jenis Koperasi :
 - Simpan Pinjam
 - Konsumen
 - Produsen
 - Pemasaran
 - Jasa
5. a. Akta Pendirian
 - Tanggal dan Nomor Akta :
 - Nama dan Tempat Kedudukan Notaris :
- b. Akta Perubahan *)
 - Tanggal dan Nomor Akta :
 - Nama dan Tempat Kedudukan Notaris :
6. Para Pendiri Koperasi
 - 6.1 Nama Lengkap :
 - Status Pekerjaan :
 - Tempat dan Tgl. Lahir:
 - Alamat jelas :
 - Kewarganegaraan :
 - 6.2dst :
7. a. Koperasi didirikan : Dengan jangka waktu terbatas/tidak terbatas *)
- b. Jika dengan jangka waktu Terbatas, didirikan untuk Jangka waktu :
8. Maksud dan Tujuan Koperasi :
9. Kegiatan usaha :
10. a. Modal Dasar Koperasi sebesar : Rp (.....)
- b. Penyetoran Simpanan Pokok sebesar : Rp. (.....)
- c. Simpanan Wajib yang Telah disetor : Rp. (.....)
11. Pemanggilan Rapat Anggota
 - a. Jangka waktu pemanggilan Rapat anggota : hari sebelum tanggal rapat
 - b. Jangka waktu pemanggilan Rapat Anggota Tahunan : hari sebelum tanggal rapat

- c. Jangka waktu pemanggilan
 Rapat Anggota Luar Biasa : hari sebelum tanggal rapat
12. Cara pemanggilan Rapat Anggota : Surat tercatat dan atau surat kabat harian
13. Tempat Rapat Anggota :
14. Korum rapat dan persyaratan sahnya keputusan :

No.	Rapat Anggota	Korum	Keputusan
a.	Rapat Anggota Tahunan Rapat Anggota 1 Rapat Anggota 2		
b.	RA Luar Biasa di luar c, d, e dan f Rapat Anggota 1 Rapat Anggota 2		
c.	Rapat Anggota untuk perubahan anggaran dasar Rapat Anggota 1 Rapat Anggota 2		
d.	Rapat Anggota untuk : - Mengalihkan/menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan koperasi - Memperpanjang jangka waktu berdirinya koperasi karena jangka waktunya berakhir - Penggabungan/Pembagian - Pembubaran koperasi		

15. Pengurus dan Pengawas
- Pengurus
- a. Tata cara percalonan :
- b. Syarat-syarat pengangkatan :
- c. Anggota Pengurus untuk
Jangka waktu :
- d. Jumlah Anggota Pengurus : orang
 Dengan susunan :
- d..1. Direktur Utama/ketua/
 Presiden Direktur *)
 Nama Lengkap :
 Tempat dan Tgl. Lahir :
 Alamat jelas :
 Kewarganegaraan :
- d.2. Wakil Direktur Utama/
 Wakil Ketua/Wakil
 Presiden Direktur
 Nama Lengkap :
 Tempat dan Tgl. Lahir :
 Alamat jelas :
 Kewarganegaraan :
- d.3. Direktur
 Nama Lengkap :
 Tempat dan Tgl. Lahir :
 Alamat jelas :
 Kewarganegaraan :

- e. Rapat Pengurus
- Korum Rapat :
- Keputusan :

Pengawas

- a. Tata cara pencalonan :
- b. Syarat-syarat pengangkatan :
- c. Anggota Pengawas diangkat oleh RA untuk jangka waktu : tahun

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya.

*) Coret yang tidak perlu

.....

Kuasa Pendiri

(.....)



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN
PROVINSI ATAU DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI
URUSAN PERKOPERASIAN KABUPATEN/KOTA*)**

Nomor : , Tgl.
Lampiran :
Perihal : Penerimaan permintaan Pengesahan
Akta Pendirian Koperasi.

Kepada Yth.
Sdr.
Pendiri Koperasi
di -
.....

Dengan ini diberitahukan, bahwa surat Saudara nomor tanggal beserta lampiran-lampiran :

1. Dua rangkap Akta Pendirian, satu diantaranya bermaterai cukup,
2. Data Akta Pendirian Koperasi,
3. Notulen rapat pembentukan koperasi,
4. Surat Kuasa,
5. Surat bukti tersedianya modal,
6. Rencana awal kegiatan usaha,
7. Susunan pengurus dan Pengawas,
8. Daftar hadir rapat pembentukan,
9. Foto copy dari masing-masing anggota pendiri.

Telah kami terima pada tanggal dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka permintaan Saudara tersebut segera diproses.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
KEPALA DINAS/KATOR/BADAN/LEMBAGA YANG
MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN
PROP/KAB/KOTA *)

(.....)
NIP.

*) Disesuaikan Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**Dinas/Kantor/Badan/Lembaga Yang menangani urusan perkoperasian
Provinsi/D.I. : *)**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :/BH/.....

**TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa pendirian Koperasi bertujuan antara lain untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya;
b. bahwa pendirian Koperasi dapat mengembangkan potensi wilayah di sekitar koperasi;
c. bahwa isi Akta Pendirian Koperasi tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
3. Keputusan Menteri Negeri Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Surat permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : mengesahkan akata pendirian untuk selanjutnya disebut beralamat/bertempat kedudukan di
- KEDUA** : dengan disahkannya akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka koperasi tersebut memperoleh status badan hukum.
- KETIGA** : nomor dan tanggal surat keputusan akta pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam buku daftar umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

KELIMA : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan pengesahan akta pendirian koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

A.N. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
GUBERNUR PROVINSI
Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga
Yang menangani urusan perkoperasian
Provinsi *)

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
C.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
2. Gubernur Provinsi

*) Disesuaikan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**Dinas/Kantor/Badan/Lembaga Yang menangani urusan perkoperasian
Kabupaten/Kota : *)**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :/BH/.....

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa pendirian Koperasi bertujuan antara lain untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya;
b. bahwa pendirian Koperasi dapat mengembangkan potensi wilayah di sekitar koperasi;
c. bahwa isi Akta Pendirian Koperasi tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
3. Keputusan Menteri Negeri Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Surat permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri
Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : mengesahkan akata pendirian untuk selanjutnya disebut beralamat/bertempat kedudukan di
- KEDUA** : dengan disahkannya akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**, maka koperasi tersebut memperoleh status badan hukum.
- KETIGA** : nomor dan tanggal surat keputusan akta pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam buku daftar umum dengan menggunakan nomor urut.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

KELIMA : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan pengesahan akta pendirian koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

A.N. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
BUPATI/WALIKOTA
Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga
Yang menangani urusan perkoperasian
Kabupaten/Kota..... *)

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
C.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
2. Gubernur Provinsi
3. Bupati/Walikota, kabupaten/Kota

*) Disesuaikan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota

Lampiran 8

KODE SURAT

No	Daerah	Kode
1	2	3
I	<p>NANGGROE ACEH DARUSSALAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Aceh Barat 2. Kab. Aceh Besar 3. Kab. Aceh Selatan 4. Kab. Aceh Singkil 5. Kab. Aceh Tengah 6. Kab. Aceh Tenggara 7. Kab. Aceh Timur 8. Kab. Aceh Utara 9. Kab. Bireuen 10. Kab. Pidie 11. Kab. Simeleu 12. Kota Banda Aceh 13. Kota Sabang 14. Kab. Bener Meriah 15. Kota Langsa 16. Kab. Aceh Jaya 17. Kota Lhoksumawe 18. Kab. Nagan Raya 19. Kab. Tamiang 20. Kab. Aceh Barat Daya 21. Kab. Gayolues 	<p>...../BH/I/.....</p> <ol style="list-style-type: none">/BH/I.1/...../BH/I.2/...../BH/I.3/...../BH/I.4/...../BH/I.5/...../BH/I.6/...../BH/I.7/...../BH/I.8/...../BH/I.9/...../BH/I.10/...../BH/I.11/...../BH/I.12/...../BH/I.13/...../BH/I.14/...../BH/I.15/...../BH/I.16/...../BH/I.17/...../BH/I.18/...../BH/I.19/...../BH/I.20/...../BH/I.21/.....
II	<p>SUMATERA UTARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Asahan 2. Kab. Dairi 3. Kab. Deli Serdang 4. Kab. Labuhan Batu 5. Kab. Langkat 6. Kab. Nias 7. Kab. Simalungun 8. Kab. Karo 9. Kab. Tapanuli Selatan 10. Kab. Tapanuli Tengah 11. Kab. Tapanuli Utara 12. Kab. Toba Samosir 13. Kota Binjai 14. Kota Medan 15. Kota Pematang Siantar 16. Kota Sibolga 17. Kota Tanjung Balai 18. Kota Tebing Tinggi 19. Kota Padang Sidempuan 20. Kab. Mandailing Natal 21. Kab. Humbang Hasundutan 22. Kab. Pakpak Barat 	<p>...../BH/II/.....</p> <ol style="list-style-type: none">/BH/II.1/...../BH/II.2/...../BH/II.3/...../BH/II.4/...../BH/II.5/...../BH/II.6/...../BH/II.7/...../BH/II.8/...../BH/II.9/...../BH/II.10/...../BH/II.11/...../BH/II.12/...../BH/II.13/...../BH/II.14/...../BH/II.15/...../BH/II.16/...../BH/II.17/...../BH/II.18/...../BH/II.19/...../BH/II.20/...../BH/II.21/...../BH/II.22/.....

1	2	3
	23. Kab. Nias Selatan/BH/II.23/.....
	24. Kab. Samosir/BH/II.24/.....
	25. Kab. Sedang Berdagai/BH/II.25/.....
III	SUMATERA BARAT/BH/III/.....
	1. Kab. Agam/BH/III.1/.....
	2. Kab. 50 Kota/BH/III.2/.....
	3. Kab. Padang Pariaman/BH/III.3/.....
	4. Kab. Pasaman/BH/III.4/.....
	5. Kab. Pesisir Selatan/BH/III.5/.....
	6. Kab. Sawah Lunto/Sijunjung/BH/III.6/.....
	7. Kab. Solok/BH/III.7/.....
	8. Kab. Tanah Datar/BH/III.8/.....
	9. Kab. Kepulauan Mentawai/BH/III.9/.....
	10. Kota Bukit Tinggi/BH/III.10/.....
	11. Kota Padang/BH/III.11/.....
	12. Kota Pariaman/BH/III.12/.....
	13. Kota Solok/BH/III.13/.....
	14. Kota Padang Panjang/BH/III.14/.....
	15. Kab. Sawah Lunto/BH/III.15/.....
	16. Kota Payakumbuh/BH/III.16/.....
	17. Kota Dharmasraya/BH/III.17/.....
	18. Kota Solok Selatan/BH/III.18/.....
	19. Kota Pasaman Barat/BH/III.19/.....
IV	RIAU/BH/IV/.....
	1. Kab. Indragiri Hilir/BH/IV.1/.....
	2. Kab. Indragiri Hulu/BH/IV.2/.....
	3. Kab. Kampar/BH/IV.3/.....
	4. Kab. Kuantan Sangingi/BH/IV.4/.....
	5. Kab. Palalawan/BH/IV.5/.....
	6. Kab. Rokan Hilir/BH/IV.6/.....
	7. Kab. Rokan Hulu/BH/IV.7/.....
	8. Kab. Siak/BH/IV.8/.....
	9. Kab. Bengkalis/BH/IV.9/.....
	10. Kota Dumai/BH/IV.10/.....
	11. Kota Pekanbaru/BH/IV.11/.....
V	KEPULAUAN RIAU/BH/V/.....
	1. Kab. Natuna/BH/V.1/.....
	2. Kab. Kepulauan Riau/BH/V.2/.....
	3. Kab. Karimun/BH/V.3/.....
	4. Kota Tanjung Pinang/BH/V.4/.....
	5. Kota Batam/BH/V.5/.....
	6. Kab. Lingga/BH/V.6/.....
VI	JAMBI/BH/VI/.....
	1. Kab. Sorolangun/BH/VI.1/.....
	2. Kab. Muaro Jambi/BH/VI.2/.....
	3. Kab. Tanjung Jabung Timur/BH/VI.3/.....
	4. Kab. Tebo/BH/VI.4/.....
	5. Kab. Batanghari/BH/VI.5/.....
	6. Kab. Kerinci/BH/VI.6/.....
	7. Kab. Bungo/BH/VI.7/.....
	8. Kab. Merangin/BH/VI.8/.....
	9. Kab. Tanjung Jabung Barat/BH/VI.9/.....
	10. Kota Jambi/BH/VI.10/.....

1	2	3
VII	SUMATERA SELATAN/BH/VII/.....
	1. Kab. Lahat/BH/VII.1/.....
	2. Kab. Muara Enim/BH/VII.2/.....
	3. Kab. Musi Banyuasin/BH/VII.3/.....
	4. Kab. Musi Rawas/BH/VII.4/.....
	5. Kab. Ogan Komering Ilir/BH/VII.5/.....
	6. Kab. Ogan Komering Ulu/BH/VII.6/.....
	7. Kab. Palembang/BH/VII.7/.....
	8. Kab. Lubuk Linggau/BH/VII.8/.....
	9. Kab. Pagar Alam/BH/VII.9/.....
	10. Kota Prabumulih/BH/VII.10/.....
	11. Kota Banyuasin/BH/VII.11/.....
	12. Kota Oku Timur/BH/VII.12/.....
	13. Kota Oku Selatan/BH/VII.13/.....
	14. Kota Ogan Ilir/BH/VII.14/.....
VIII	BANGKA BELITUNG/BH/VIII/.....
	1. Kab. Bangka/BH/VIII.1/.....
	2. Kab. Belitung/BH/VIII.2/.....
	3. Kota Pangkal Pinang/BH/VIII.3/.....
	4. Kab. Bangka Barat/BH/VIII.4/.....
	5. Kab. Bangka Tengah/BH/VIII.5/.....
	6. Kab. Bangka Selatan/BH/VIII.6/.....
	7. Kab. Belitung Timur/BH/VIII.7/.....
IX	BENGKULU/BH/IX/.....
	1. Kab. Bengkulu Selatan/BH/IX.1/.....
	2. Kab. Bengkulu Utara/BH/IX.2/.....
	3. Kab. Rejang Lebong/BH/IX.3/.....
	4. Kota Bengkulu/BH/IX.4/.....
	5. Kab. Muko-Muko/BH/IX.5/.....
	6. Kab. Seluma/BH/IX.6/.....
	7. Kab. Saur/BH/IX.7/.....
	8. Kab. Kepayang/BH/IX.8/.....
	9. Kab. Lebong/BH/IX.9/.....
X	LAMPUNG/BH/X/.....
	1. Kab. Lampung Selatan/BH/X.1/.....
	2. Kab. Lampung Tengah/BH/X.2/.....
	3. Kab. Lampung Utara/BH/X.3/.....
	4. Kab. Lampung Barat/BH/X.4/.....
	5. Kab. Tulang Bawang/BH/X.5/.....
	6. Kab. Tanggamus/BH/X.6/.....
	7. Kab. Lampung Timur/BH/X.7/.....
	8. Kab. Way Kanan/BH/X.8/.....
	9. Kota Bandar Lampung/BH/X.9/.....
	10. Kab. Metro/BH/X.10/.....
XI	BANTEN/BH/XI/.....
	1. Kab. Lebak/BH/XI.1/.....
	2. Kab. Serang/BH/XI.2/.....
	3. Kab. Tangerang/BH/XI.3/.....
	4. Kota Cilegon/BH/XI.4/.....
	5. Kota Tangerang/BH/XI.5/.....
	6. Kab. Pandeglang/BH/XI.6/.....

1	2	3
XII	DKI JAKARTA 1. Kota Jakarta Pusat 2. Kota Jakarta Utara 3. Kota Jakarta Barat 4. Kota Jakarta Selatan 5. Kota Jakarta Timur 6. Kab. Kepulauan Seribu/BH/XII/...../BH/XII.1/...../BH/XII.2/...../BH/XII.3/...../BH/XII.4/...../BH/XII.5/...../BH/XII.6/.....
XIII	JAWA BARAT 1. Kab. Bandung 2. Kab. Bekasi 3. Kota Bekasi 4. Kab. Bogor 5. Kota Bogor 6. Kab. Ciamis 7. Kab. Cianjur 8. Kab. Garut 9. Kab. Indramayu 10. Kab. Kerawang 11. Kab. Kuningan 12. Kab. Majalengka 13. Kab. Purwakarta 14. Kab. Subang 15. Kab. Sukabumi 16. Kota Sukabumi 17. Kota Sumedang 18. Kab. Tasikmalaya 19. Kota Tasikmalaya 20. Kab. Cirebon 21. Kota Cirebon 22. Kota Banjar 23. Kota Bandung 24. Kota Cimahi 25. Kota Depok/BH/XIII/...../BH/XIII.1/...../BH/XIII.2/...../BH/XIII.3/...../BH/XIII.4/...../BH/XIII.5/...../BH/XIII.6/...../BH/XIII.7/...../BH/XIII.8/...../BH/XIII.9/...../BH/XIII.10/...../BH/XIII.11/...../BH/XIII.12/...../BH/XIII.13/...../BH/XIII.14/...../BH/XIII.15/...../BH/XIII.16/...../BH/XIII.17/...../BH/XIII.18/...../BH/XIII.19/...../BH/XIII.20/...../BH/XIII.21/...../BH/XIII.22/...../BH/XIII.23/...../BH/XIII.24/...../BH/XIII.25/.....
XIV	JAWA TENGAH 1. Kab. Banjarnegara 2. Kab. Banyumas 3. Kab. Batang 4. Kab. Blora 5. Kab. Boyolali 6. Kab. Brebes 7. Kab. Cilacap 8. Kab. Demak 9. Kab. Grobogan 10. Kab. Jepara 11. Kab. Karanganyar 12. Kab. Kebumen 13. Kab. Kendal 14. Kab. Klaten 15. Kab. Kudus 16. Kab. Magelang 17. Kab. Pati 18. Kab. Pekalongan 19. Kab. Pemasang 20. Kab. Purbalingga/BH/XIV/...../BH/XIV.1/...../BH/XIV.2/...../BH/XIV.3/...../BH/XIV.4/...../BH/XIV.5/...../BH/XIV.6/...../BH/XIV.7/...../BH/XIV.8/...../BH/XIV.9/...../BH/XIV.10/...../BH/XIV.11/...../BH/XIV.12/...../BH/XIV.13/...../BH/XIV.14/...../BH/XIV.15/...../BH/XIV.16/...../BH/XIV.17/...../BH/XIV.18/...../BH/XIV.19/...../BH/XIV.20/.....

1	2	3
	21. Kab. Purworejo/BH/XIV.21/.....
	22. Kab. Rembang/BH/XIV.22/.....
	23. Kab. Semarang/BH/XIV.23/.....
	24. Kab. Sragen/BH/XIV.24/.....
	25. Kab. Sukoharjo/BH/XIV.25/.....
	26. Kab. Tegal/BH/XIV.26/.....
	27. Kab. Temanggung/BH/XIV.27/.....
	28. Kota Surakarta/BH/XIV.28/.....
	29. Kab. Wonosobo/BH/XIV.29/.....
	30. Kab. Wonogiri/BH/XIV.30/.....
	31. Kota Salatiga/BH/XIV.31/.....
	32. Kota Magelang/BH/XIV.32/.....
	33. Kota Tegal/BH/XIV.33/.....
	34. Kota Semarang/BH/XIV.34/.....
	35. Kab. Pekalongan/BH/XIV.35/.....
XV	DI YOGYAKARTA/BH/XV/.....
	1. Kab. Bantul/BH/XV.1/.....
	2. Kab. Gunung Kidul/BH/XV.2/.....
	3. Kab. Kulon Progo/BH/XV.3/.....
	4. Kab. Sleman/BH/XV.4/.....
	5. Kota Yogyakarta/BH/XV.5/.....
XVI	JAWA TIMUR/BH/XVI/.....
	1. Kab. Bangkalan/BH/XVI.1/.....
	2. Kab. Banyuwangi/BH/XVI.2/.....
	3. Kab. Blitar/BH/XVI.3/.....
	4. Kab. Bojonegoro/BH/XVI.4/.....
	5. Kab. Bondowoso/BH/XVI.5/.....
	6. Kab. Gresik/BH/XVI.6/.....
	7. Kab. Jember/BH/XVI.7/.....
	8. Kab. Jombang/BH/XVI.8/.....
	9. Kab. Kediri/BH/XVI.9/.....
	10. Kab. Lamongan/BH/XVI.10/.....
	11. Kab. Lumajang/BH/XVI.11/.....
	12. Kab. Madiun/BH/XVI.12/.....
	13. Kab. Magetan/BH/XVI.13/.....
	14. Kab. Malang/BH/XVI.14/.....
	15. Kab. Mojokerto/BH/XVI.15/.....
	16. Kab. Nganjuk/BH/XVI.16/.....
	17. Kab. Ngawi/BH/XVI.17/.....
	18. Kab. Pacitan/BH/XVI.18/.....
	19. Kab. Pamekasan/BH/XVI.19/.....
	20. Kab. Pasuruan/BH/XVI.20/.....
	21. Kab. Ponorogo/BH/XVI.21/.....
	22. Kab. Probolinggo/BH/XVI.22/.....
	23. Kab. Sampang/BH/XVI.23/.....
	24. Kab. Sidoarjo/BH/XVI.24/.....
	25. Kab. Situbondo/BH/XVI.25/.....
	26. Kab. Sumenep/BH/XVI.26/.....
	27. Kab. Trenggalek/BH/XVI.27/.....
	28. Kab. Tuban/BH/XVI.28/.....
	29. Kab. Tulungagung/BH/XVI.29/.....
	30. Kota Blitar/BH/XVI.30/.....
	31. Kota Kediri/BH/XVI.31/.....
	32. Kota Madiun/BH/XVI.32/.....
	33. Kota Malang/BH/XVI.33/.....

1	2	3
	34. Kota Mojokerto 35. Kota Pasuruan 36. Kota Probolinggo 37. Kota Surabaya 38. Kota Batu/BH/XVI.34/...../BH/XVI.35/...../BH/XVI.36/...../BH/XVI.37/...../BH/XVI.38/.....
XVII	KALIMANTAN BARAT 1. Kab. Bengkayang 2. Kab. Kapuas Hulu 3. Kab. Ketapang 4. Kab. Landak 5. Kab. Pontianak 6. Kab. Sambas 7. Kab. Sanggau 8. Kab. Sintang 9. Kota Singkawang 10. Kota Pontianak 11. Kab. Sekadau 12. Kab. Melawi/BH/XVII/...../BH/XVII.1/...../BH/XVII.2/...../BH/XVII.3/...../BH/XVII.4/...../BH/XVII.5/...../BH/XVII.6/...../BH/XVII.7/...../BH/XVII.8/...../BH/XVII.9/...../BH/XVII.10/...../BH/XVII.11/...../BH/XVII.12/.....
XVIII	KALIMANTAN TENGAH 1. Kab. Barito Selatan 2. Kab. Barito Utara 3. Kab. Kapuas 4. Kab. Kotawaringin Barat 5. Kab. Kotawaringin Timur 6. Kota Palangkaraya 7. Kab. Barito Timur 8. Kab. Sukamara 9. Kab. Lamadau 10. Kab. Katingan 11. Kab. Pulau Pisau 12. Kab. Gunung Mas 13. Kab. Murung Raya 14. Kab. Seruyan/BH/XVIII/...../BH/XVIII.1/...../BH/XVIII.2/...../BH/XVIII.3/...../BH/XVIII.4/...../BH/XVIII.5/...../BH/XVIII.6/...../BH/XVIII.7/...../BH/XVIII.8/...../BH/XVIII.9/...../BH/XVIII.10/...../BH/XVIII.11/...../BH/XVIII.12/...../BH/XVIII.13/...../BH/XVIII.14/.....
XIX	KALIMANTAN SELATAN 1. Kab. Banjar 2. Kab. Barito Kuala 3. Kab. Hulu Sungai Selatan 4. Kab. Hulu Sungai Tengah 5. Kab. Balangan 6. Kab. Kota Baru 7. Kab. Tabalog 8. Kab. Tanah Laut 9. Kab. Tapin 10. Kota Banjarmasin 11. Kota Banjar Baru 12. Kab. Hulu Sungai 13. Kab. Tanah Bumbu/BH/XIX/...../BH/XIX.1/...../BH/XIX.2/...../BH/XIX.3/...../BH/XIX.4/...../BH/XIX.5/...../BH/XIX.6/...../BH/XIX.7/...../BH/XIX.8/...../BH/XIX.9/...../BH/XIX.10/...../BH/XIX.11/...../BH/XIX.12/...../BH/XIX.13/.....
XX	KALIMANTAN TIMUR 1. Kab. Berau 2. Kab. Bulungan 3. Kab. Kutai Timur 4. Kab. Kutai Barat 5. Kab. Kutai Kertanegara/BH/XX/...../BH/XX.1/...../BH/XX.2/...../BH/XX.3/...../BH/XX.4/...../BH/XX.5/.....

1	2	3
	6. Kab. Malinau 7. Kab. Nunukan 8. Kab. Pasir 9. Kab. Pasir Utara 10. Kota Balikpapan 11. Kota Bontang 12. Kota Samarinda 13. Kota Tarakan/BH/XX.6/...../BH/XX.7/...../BH/XX.8/...../BH/XX.9/...../BH/XX.10/...../BH/XX.11/...../BH/XX.12/...../BH/XX.13/.....
XXI	SULAWESI TENGGARA 1. Kab. Konawe 2. Kab. Muna 3. Kab. Buton 4. Kab. Kolaka 5. Kota Kendari 6. Kota Bau-Bau 7. Kota Kendari 8. Kab. Konseil 9. Kab. Bombana 10. Kab. Kolaka Utara 11. Kab. Wakatobi/BH/XXI/...../BH/XXI.1/...../BH/XXI.2/...../BH/XXI.3/...../BH/XXI.4/...../BH/XXI.5/...../BH/XXI.6/...../BH/XXI.7/...../BH/XXI.8/...../BH/XXI.9/...../BH/XXI.10/...../BH/XXI.11/.....
XXII	GORONTALO 1. Kab. Boalemo 2. Kab. Gorontalo 3. Kota Gorontalo 4. Kab. Bone Bolango 5. Kab. Pahuwato/BH/XXII/...../BH/XXII.1/...../BH/XXII.2/...../BH/XXII.3/...../BH/XXII.4/...../BH/XXII.5/.....
XXIII	SULAWESI TENGAH 1. Kab. Banggai 2. Kab. Banggai Kepulauan 3. Kab. Buol 4. Kab. Donggala 5. Kab. Morowali 6. Kab. Poso 7. Kab. Toli-Toli 8. Kab. Paringi Moutong 9. Kota Palu 10. Kab. Tojo Una-Una/BH/XXIII/...../BH/XXIII.1/...../BH/XXIII.2/...../BH/XXIII.3/...../BH/XXIII.4/...../BH/XXIII.5/...../BH/XXIII.6/...../BH/XXIII.7/...../BH/XXIII.8/...../BH/XXIII.9/...../BH/XXIII.10/.....
XXIV	SULAWESI SELATAN 1. Kab. Bulu Kumba 2. Kab. Barru 3. Kab. Bone 4. Kab. Enrekang 5. Kab. Gowa 6. Kab. Jeneponto 7. Kab. Palopo 8. Kab. Luwu Utara 9. Kota Pare-Pare 10. Kab. Maros 11. Kab. Pangkep 12. Kab. Pinrang 13. Kab. Selayar 14. Kab. Sidrap 15. Kab. Sinjai/BH/XXIV/...../BH/XXIV.1/...../BH/XXIV.2/...../BH/XXIV.3/...../BH/XXIV.4/...../BH/XXIV.5/...../BH/XXIV.6/...../BH/XXIV.7/...../BH/XXIV.8/...../BH/XXIV.9/...../BH/XXIV.10/...../BH/XXIV.11/...../BH/XXIV.12/...../BH/XXIV.13/...../BH/XXIV.14/...../BH/XXIV.15/.....

1	2	3
	16. Kab. Soppeng/BH/XXIV.16/.....
	17. Kab. Takalar/BH/XXIV.17/.....
	18. Kab. Tana Toraja/BH/XXIV.18/.....
	19. Kab. Wajo/BH/XXIV.19/.....
	20. Kab. Makassar/BH/XXIV.20/.....
	21. Kab. Luwu/BH/XXIV.21/.....
	22. Kab. Luwu Timur/BH/XXIV.22/.....
	23. Kab. Bantaeng/BH/XXIV.23/.....
XXV	SULAWESI UTARA/BH/XXV/.....
	1. Kab. Minahasa/BH/XXV.1/.....
	2. Kab. Sanghie Talaud/BH/XXV.2/.....
	3. Kab. Bolaang Mongondow/BH/XXV.3/.....
	4. Kota Manado/BH/XXV.4/.....
	5. Kota Bitung/BH/XXV.5/.....
	6. Kota Tomohon/BH/XXV.6/.....
	7. Kab. Kep. Talaud/BH/XXV.7/.....
	8. Kab. Minahasa Selatan/BH/XXV.8/.....
	9. Kab. Minahasa Utara/BH/XXV.9/.....
XXVI	SULAWESI BARAT/BH/XXVI/.....
	1. Kab. Mamuju/BH/XXVI.1/.....
	2. Kab. Polewali Mamasa/BH/XXVI.2/.....
	3. Kab. Majene/BH/XXVI.3/.....
	4. Kab. Mamasa/BH/XXVI.4/.....
	5. Kab. Mamuju Utara/BH/XXVI.5/.....
XXVII	BALI/BH/XXVII/.....
	1. Kab. Badung/BH/XXVII.1/.....
	2. Kab. Bangli/BH/XXVII.2/.....
	3. Kab. Buleleng/BH/XXVII.3/.....
	4. Kab. Gianyar/BH/XXVII.4/.....
	5. Kab. Jembrana/BH/XXVII.5/.....
	6. Kab. Karangasem/BH/XXVII.6/.....
	7. Kab. Klungkung/BH/XXVII.7/.....
	8. Kab. Tabanan/BH/XXVII.8/.....
	9. Kota Denpasar/BH/XXVII.9/.....
XXVIII	NUSA TENGGARA BARAT/BH/XXVIII/.....
	1. Kab. Bima/BH/XXVIII.1/.....
	2. Kota Bima/BH/XXVIII.2/.....
	3. Kab. Dompu/BH/XXVIII.3/.....
	4. Kab. Lombok Barat/BH/XXVIII.4/.....
	5. Kab. Lombok Tengah/BH/XXVIII.5/.....
	6. Kab. Lombok Timur/BH/XXVIII.6/.....
	7. Kab. Sumbawa/BH/XXVIII.7/.....
	8. Kota Mataram/BH/XXVIII.8/.....
	9. Kab. Sumbawa Barat/BH/XXVIII.9/.....
XXIX	NUSA TENGGARA TIMUR/BH/XXIX/.....
	1. Kab. Alor/BH/XXIX.1/.....
	2. Kab. Belu/BH/XXIX.2/.....
	3. Kab. Ende/BH/XXIX.3/.....
	4. Kab. Flores Timur/BH/XXIX.4/.....
	5. Kab. Kupang/BH/XXIX.5/.....
	6. Kota Kupang/BH/XXIX.6/.....

1	2	3
	7. Kab. Lembata/BH/XXIX.7/.....
	8. Kab. Manggarai/BH/XXIX.8/.....
	9. Kab. Ngada/BH/XXIX.9/.....
	10. Kab. Sikka/BH/XXIX.10/.....
	11. Kab. Sumba Barat/BH/XXIX.11/.....
	12. Kab. Sumba Timur/BH/XXIX.12/.....
	13. Kab. Timur Tengah Selatan/BH/XXIX.13/.....
	14. Kab. Timur Tengah Utara/BH/XXIX.14/.....
	15. Kab. Rote N'dao/BH/XXIX.15/.....
	16. Kab. Manggarai Barat/BH/XXIX.16/.....
	17. Kab. Larantuka/BH/XXIX.17/.....
XXX	MALUKU/BH/XXX/.....
	1. Kab. Maluku Tengah/BH/XXX.1/.....
	2. Kab. Maluku Tenggara/BH/XXX.2/.....
	3. Kab. Maluku Tenggara Barat/BH/XXX.3/.....
	4. Kab. Buru/BH/XXX.4/.....
	5. Kab. Ambon/BH/XXX.5/.....
	6. Kab. Aru/BH/XXX.6/.....
	7. Kab. Seram Barat/BH/XXX.7/.....
	8. Kab. Seram Timur/BH/XXX.8/.....
XXXI	MALUKU UTARA/BH/XXXI/.....
	1. Kab. Halmahera Barat/BH/XXXI.1/.....
	2. Kab. Halmahera Tengah/BH/XXXI.2/.....
	3. Kota Ternate/BH/XXXI.3/.....
	4. Kota Tidore Kepulauan/BH/XXXI.4/.....
	5. Kab. Halmahera Timur/BH/XXXI.5/.....
	6. Kab. Halmahera Utara/BH/XXXI.6/.....
	7. Kab. Halmahera Selatan/BH/XXXI.7/.....
	8. Kab. Kepulauan Sula/BH/XXXI.8/.....
XXXII	PAPUA/BH/XXXII/.....
	1. Kab. Jayapura/BH/XXXII.1/.....
	2. Kab. Merauke/BH/XXXII.2/.....
	3. Kab. Jayawijaya/BH/XXXII.3/.....
	4. Kota Jayapura/BH/XXXII.4/.....
	5. Kab. Nabire/BH/XXXII.5/.....
	6. Kab. Pinjai/BH/XXXII.6/.....
	7. Kab. Biak Numfor/BH/XXXII.7/.....
	8. Kab. Puncak Jaya/BH/XXXII.8/.....
	9. Kab. Mimika/BH/XXXII.9/.....
	10. Kab. Yapen/BH/XXXII.10/.....
	11. Kab. Asmat/BH/XXXII.11/.....
	12. Kab. Boven Digoel/BH/XXXII.12/.....
	13. Kab. Keerom/BH/XXXII.13/.....
	14. Kab. Mappi/BH/XXXII.14/.....
	15. Kab. Pegunungan Bintang/BH/XXXII.15/.....
	16. Kab. Sarmi/BH/XXXII.16/.....
	17. Kab. Supiori/BH/XXXII.17/.....
	18. Kab. Tolikora/BH/XXXII.18/.....
	19. Kab. Waropen/BH/XXXII.19/.....
	20. Kab. Yukohimo/BH/XXXII.20/.....

1	2	3
XXXIII	IRIAN JAYA BARAT 1. Kab. Fafak 2. Kab. Manokwari 3. Kab. Sorong 4. Kota Sorong 5. Kab. Kaimana 6. Kab. Teluk Wondama 7. Kab. Raja Ampat 8. Kab. Sorong Selatan 9. Kab. Teluk Bintuni/BH/XXXIII/..... /BH/XXXIII.1/...../BH/XXXIII.2/...../BH/XXXIII.3/...../BH/XXXIII.4/...../BH/XXXIII.5/...../BH/XXXIII.6/...../BH/XXXIII.7/...../BH/XXXIII.8/...../BH/XXXIII.9/.....



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**BUKU DAFTAR UMUM KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI/KAB/KOTA.....*)**

*) Sesuai dengan keadaannya (Meneg/Dinas)

BUKU DAFTAR UMUM KOPERASI

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 1. Nomor Urut | : | |
| 2. Nama Koperasi | : | |
| 3. Tempat Kedudukan/Alamat | : | |
| 4. Jenis Kegiatan | : | |
| 5. Kegiatan Usaha yang dilaksanakan | : | |
| 6. Nomor dan tanggal Surat Keputusan
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi | : | |
| 7. Tanggal pengumuman Surat Keputusan
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
dalam Berita Negara | : | |
| 8. Nomor dan tanggal Surat Keputusan
Pengesahan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi | : | |
| 9. Tanggal pengumuman Surat Keputusan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Dalam Berita Negara | : | |
| 10. Nomor dan tanggal Surat Keputusan
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi | : | |
| 11. Tanggal pengumuman Surat Keputusan
Perubahan Anggaran Dasar dalam
Berita Negara | : | |
| 12. Nomor dan tanggal Surat Keputusan
Pembubaran Koperasi | : | |
| 13. Tanggal pengumuman Surat Keputusan
Pembubaran Koperasi dalam Berita Negara | : | |

*) Disesuaikan



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASI PROVINSI ATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA/YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KABUPATEN/KOTA.....*)**

..... tanggal

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permintaan Pengesahan
Akta Pendirian Koperasi

Kepada Yth. :
Sdr.
Pendiri Koperasi
di-

Sesuai surat Saudara nomor tanggal tentang permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dengan ini kami sampaikan bahwa permintaan Saudara tidak dapat disetujui, karena alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Terhadap penolakan ini Saudara dapat mengajukan permintaan ulang selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat penolakan ini.

**DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
ATAU KEPALA DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG
MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN PROVINSI/D.I ATAU
KEPALA DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KAB/KOTA*)**

(.....)
NIP.

*) Sesuai dengan keadaan (Pusat/Provinsi/Kab/Kota)



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN PROVINSIATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEBAGA/YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KABUPATEN/KOTA*)**

.....tanggal.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permintaan Ulang
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Kepada Yth. :
Sdr.
Pendiri Koperasi
di-

Sesuai surat Saudara nomor tanggal tentang permintaan Ulang pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dengan ini kami sampaikan bahwa permintaan Saudara tidak dapat disetujui, karena alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Dengan penolakan ini, Saudara tidak lagi dapat mengajukan permintaan ulang.

**DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
ATAU KEPALA DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG
MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN PROVINSI/D.IATAU
KEPALA DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KAB/KOTA*)**

(.....)
NIP.

*)Sesuai dengan keadaan (Pusat/Propinsi/Kab/Kota)

**Notulen Rapat Anggota
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi**

Hari ini :
Tanggal :
Pukul : s/dwib.
Tempat : di jalan.....(kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota).
Pimpinan rapat :
Isi rapat :

Telah diadakan Rapat Anggota Pendirian Koperasi yang dihadiri oleh Orang Peserta, dengan pimpinan rapat yang dipilih oleh peserta rapat Tuan/nyonya.....

Pimpinan Rapat menyampaikan agenda acara Rapat adalah : -----
1.(misalnya : membahas anggaran dasar Koperasi).
2.
3.
4. dan seterusnya.....

Peserta rapat masing-masing menyampaikan dan seterusnya..... Pimpinan rapat menyampaikan kesimpulan rapat -----Peserta rapat menyampaikan : -----

1. menyetujui (misalnya Anggaran Dasar Koperasi).
2. menyetujui
3. dan seterusnya

Pimpinan Rapat menyampaikan kesimpulan akhir rapat dan seterusnya. -----

Oleh karena tidak lagi yang dibicarakan atau minta berbicara, maka ketua Rapat menutup rapat pada jam WIB (..... Waktu Indonesia Barat)-----

Dari segala sesuatu yang tersebut terdahulu, maka dibuatlah Notulen Rapat ini untuk dapat dieprgunakan sebagaimana semestinya. -----

.....200.....

Wakil Peserta Rapat

Pimpinan Rapat

(.....)

(.....)

**DATA AKTA PENDIRIAN KOPERASI
(Pasal 12 UU No. 25/1992)**

- 1. Nama :
- 2. Tempat Kedudukan :
- 3. NPWP :
- a. Nomor :
- b. Kantor Pelayanan yang mengeluarkan :
- 4. Jenis : -
-
-

- 5. Pengesahan / Persetujuan*)
Menteri Koperasi dan UKM
Tanggal dan Nomor Pengesahan/
Persetujuan :
- 6. Pendaftaran Dalam Buku Daftar Umum
Terakhir Tanggal dan Nomor Pendaftaran :
- 7. Pengumuman dalam Tambahan
Berita Negara RI Terakhir
Nomor dan Tahun Pengumuman :
- 8. Akta Perubahan
Tanggal dan Tempat Kedudukan
Notaris :
- 9. Bentuk Akta Perubahan : Notulen Rapat
- 10. Perubahan Ketentuan

Pasal/Status*)	Semula Berbunyi	Menjadi Berbunyi
.....
.....
.....

- 11. Pemanggilan Rapat Anggota :
 - a. Pemanggilan RA dilakukan oleh : Pengurus/Pengawas,*)
 - b. Pada tanggal :
 - c. Pemberitahuan akan diadakan RA,
Koperasi Tanggal Pemberitahuan
Mengenai akan diadakan RA. :
 - d. Panggilan RA Tahunan
Pada tanggal :
 - e. Panggilan RA perubahan AD
Pada tanggal :
 - f. Cara Panggilan RA
Nama, tempat dan tanggal
Penerbitan 2 (dua) surat
Kabar harian yang memuat
Panggilan mengenai akan
Diadakan RA : 1.
2.

12. RA diadakan pada
 Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Dengan acara :
13. a. Pemimpin rapat
 Pengurus/Pengawas/.....Anggota*) :
- b. Data Pribadi Pimpinan Rapat
 Nama Lengkap :
 Jabatan :
 Jangka Waktu Keanggotaan :tahun.
 Klasifikasi Keanggotaan : penuh/calon/luarbiasa/kehormatan*)
14. Korum rapat dan persyaratan sahnya keputusan
 a. Jumlah anggota dengan hak suara
 Yang sah yang telah ditetapkan oleh
 Koperasi : orang/BH
 b. Jumlah anggota dengan hak suara
 yang sah yang hadir dalam rapat : orang/BH
 c. keputusan rapat disetujui oleh
 suara yang dikeluarkan dalam rapat : dari jumlah
15. Ketrangan lain-lain :

Dengan ini kami menyatakan bahwa data Akta Perubahan Anggaran Dasar ini kami buat dengan sebenarnya.

..... 200

Pengurus
 Cap/Tanda tangan materai

(.....)
 Nama Lengkap

Catatan Kaki:
 *) coret yang tidak perlu

DATA AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

(Pasal 12 UU No. 25/19920)

- 1. Nama :
- 2. Tempat kedudukan :
- 3. NPWP
 - a. Nomor :
 - b. Kantor Pelayanan yang mengeluarkan :
- 4. Jenis :
:
:
- 5. Pengesahan / Persetujuan*)
Menteri Koperasi dan UKM
Tanggal dan Nomor Pengesahan/
Persetujuan :
- 6. Pendaftaran dalam Daftar Koperasi
Terakhir Tanggal dan Nomor Pendaftaran :
- 7. Pengumuman dalam Tambahan
Berita Negara RI Terakhir
Nomor dan Tahun Pengumuman :
- 8. Akta Perubahan
Tanggal dan Tempat Kedudukan
Notaris :
- 9. Bentuk Akta Perubahan : Akta Berita Acara Rapat/Akta
Pernyataan Keputusan Rapat*)

10. Perubahan Ketentuan

Pasal/Status*)	Semula Sembunyi	Menjadi Berbunyi
.....
.....
.....

- 11. Pemanggilan Rapat Anggota :
 - a. Pemanggilan RA dilakukan oleh : Pengurus/Pengawas.*)
 - b. Pada Tanggal :
 - c. Pemberitahuan akan diadakan RA.
Koperasi Tanggal Pemberitahuan
Mengenai akan diadakan RA. :
 - d. Panggilan RA Tahunan
Pada tanggal :
 - e. Panggilan RA perubahan AD
pada tanggal :
 - f. Cara panggilan RA : Surat tercatat/Surat kabar harian*)
Nama, tempat dan tanggal
Penerbitan 2 (dua) surat
Kabar harian yang memuat
Panggilan mengenai akan
Diadakan RA : 1.
2.

- 12. RA diadakan pada
 - Hari :
 - Tanggal :
 - Jam :
 - Tempat :
 - Dengan acara :
- 13. a. Pemimpin rapat :
 - PENGURUS/Pengawas/.....*)
- b. Data pribadi Pimpinan Rapat
 - Nama Lengkap :
 - Jabatan :
 - Tempat :
 - Dengan acara :
- 14. Korum rapat dan persyaratan sahnya Keputusan
 - a. Jumlah anggota dengan hak suara yang sah telah ditetapkan oleh koperasi :orang/BH.
 - b. Jumlah anggota dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat :orang/BH
 - c. Keputusan rapat disetujui oleh suara yang dikeluarkan dalam rapat :dari Jumlah
- 15. Keterangan lain-lain :

Dengan ini kami menyatakan bahwa data Akta perubahan Anggaran Dasar ini kami buat dengan sebenarnya.

..... 200

Pengurus
Cap/Tanda tangan materai

(.....)
Nama Lengkap

Catatan Kaki:

*) coret yang tidak perlu

KOPERASI.....

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi
(Menyangkut perubahan bidang usaha)

Kepada Yth,

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Provinsi..... atau Kepala Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Kabupaten/Kota*
Di

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami lampirkan :

1. Dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup,
2. Data akta pendirian dan data perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan/atau Berita Acara,
3. Notulen Rapat dan daftar hadir Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,
4. Foto copy akta pendirian dan Anggaran Dasar yang lama,
5. Foto copy buku daftar anggota,
6. Nomor Pokok wajib pajak,
7. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi,

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

*) Disesuaikan dengan permohonan ditujukan.

KOPERASI.....

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi
(Menyangkut penggabungan koperasi)

Kepada Yth,

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Provinsi..... atau Kepala Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Kabupaten/Kota*).

Di

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami lampirkan :

1. Dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup,
2. Data akta pendirian dan data perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan,
3. Notulen Rapat dan daftar hadir Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang bergabung,
4. Neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung,
5. Neraca awal Koperasi hasil penggabungan,
6. Foto copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama,
7. Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi hasil penggabungan,
8. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi hasil penggabungan.

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

*) Disesuaikan dengan permohonan ditujukan.

KOPERASI.....

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi
(Menyangkut pembagian Koperasi)

Kepada Yth,

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Provinsi..... atau Kepala Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Kabupaten/Kota*
Di

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami lampirkan :

1. Dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup,
2. Data akta pendirian dan data akta perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi,
3. Notulen Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi,
4. Neraca yang baru dari Koperasi yang dibagi
5. Daftar Hadir Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,
6. Foto copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama,
7. Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi yang dibagi,
8. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi.

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

*) Disesuaikan dengan permohonan ditujukan.



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASI PROVINSI ATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA/YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KABUPATEN/KOTA.....*)**

..... tanggal

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Permintaan Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar

Kepada Yth. :
Sdr.
Pendiri Koperasi
di-

Dengan ini diberitahukan, bahwa surat Saudara nomor tanggal beserta lampiran-lampiran.

1. Dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup.
2.
3.
4.
5.
6. dan seterusnya **)

Telah kami terima pada tanggal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka permintaan Saudara tersebut segera diproses.

**DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM ATAU DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA
YANG MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN PROVINSI/..... ATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN KAB/KOTA
.....*)**

(.....)
NIP.

*) Kop surat tanda terima disesuaikan dengan daerahnya (Pusat/Provinsi/Kab/Kota).

**) Lampiran disesuaikan dengan jenis perubahan anggaran dasar yang dilakukan (perubahan bidang usaha/penggabungan/pembagian koperasi).



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Provinsi/Kabupaten/Kota :
.....*)

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :/PAD/.....

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI.....
BADAN HUKUM NOMOR.....TANGGAL.....**

- Menimbang :
- Bahwa perubahan anggaran dasar koperasi..... bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota.
 - bahwa perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Koperasi.
 - bahwa isi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan pengesahan akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1994).
 - Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 123/kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten kota.
- Memperhatikan : Surat permohonan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari pengurus Koperasi Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi badan Hukum Nomor tanggal Beralamat. bertempat kedudukan di
- KEDUA : Merubah pasal-pasal sebagaimana pada Anggaran Dasar Koperasi (terlampir).
- KETIGA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KE EMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KE LIMA : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

A.N. MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....
Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga
Yang menangani urusan perkoperasian
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

.....
NIP.

Tembusan Yth.

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
c.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
 2. Gubernur/Bupati/Walikota
- *) sesuai dengan keadaan